

## **ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023-2024: KEMANDIRIAN, EFISIENSI, DAN KESERASIAN BELANJA**

**Windi Larasati<sup>1</sup>, Renny Maisyarah<sup>2</sup>, Suriani Lafau<sup>3</sup>, Karnisa Maharani<sup>4</sup>**  
**Universitas Pembangunan Pancabudi Medan**  
Email: [larasatiwindi29@gmail.com](mailto:larasatiwindi29@gmail.com)<sup>1</sup>, [rennymaisyarah@gmail.com](mailto:rennymaisyarah@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, efisien, dan proporsional. Kabupaten Nias Selatan, sebagai salah satu daerah dengan struktur fiskal yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, menghadapi tantangan signifikan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan belanja yang berimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023-2024 melalui pendekatan rasio keuangan daerah, meliputi rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi belanja, dan keserasian belanja (belanja operasi dan belanja modal). Penelitian menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah hanya sebesar 2,04% pada tahun 2024, bahkan menurun dari 2,52% pada tahun 2023, mengindikasikan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer (97,13% dari total pendapatan). Meskipun rasio efektivitas PAD mencapai 139,53%, kontribusi absolut PAD justru menurun 18,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio efisiensi belanja melampaui 100% (102,60%), menandakan defisit anggaran. Rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasi (51,84%) dibanding belanja modal (18,36%), dengan belanja pegawai mencapai 55,20% dari belanja operasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemetaan kerentanan fiskal daerah pemekaran dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan intensifikasi PAD serta realokasi belanja yang lebih produktif.

**Kata Kunci:** Rasio Keuangan Daerah, Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Belanja, Keserasian Belanja, LKPD.

## PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade di Indonesia menempatkan kemandirian fiskal sebagai indikator utama keberhasilan desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan semata-mata bergantung pada Dana Transfer dari pemerintah pusat (Halim & Kusufi, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah, khususnya daerah hasil pemekaran dan daerah dengan kondisi geografis kepulauan atau terpencil, masih sangat bergantung pada transfer fiskal pusat untuk membiayai operasional dan pembangunan daerahnya.

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur dan basis ekonomi yang relatif terbatas, Kabupaten Nias Selatan menghadapi tantangan struktural dalam menggali potensi PAD. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan mencapai Rp1.552.128.805.972,14, namun kontribusi PAD hanya sebesar Rp30.783.762.868,34 atau sekitar 1,98% dari total pendapatan, sementara Pendapatan Transfer menyumbang 97,13%. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan struktur pendapatan yang ekstrem dan menjadi isu krusial dalam evaluasi kinerja keuangan daerah.

Di sisi belanja, total realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.592.441.517.658,05, meningkat 10,82% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didominasi oleh kenaikan belanja operasi, terutama belanja pegawai yang naik 17,41%, sementara belanja modal—yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan aset produktif—hanya tumbuh pada porsi 18,36% dari total belanja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan fiskal daerah: apakah alokasi belanja telah cukup mendukung pembangunan jangka panjang, ataukah justru terjebak pada pola belanja konsumtif yang didominasi belanja rutin.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan teknik analisis rasio keuangan daerah. Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, yang dipublikasikan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan data perbandingan Tahun Anggaran 2023.

Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah (PAD dibandingkan dengan Pendapatan Transfer dan terhadap total pendapatan), rasio efektivitas PAD (realisasi PAD dibandingkan target anggaran PAD), rasio efisiensi keuangan daerah (total realisasi belanja dibandingkan total realisasi pendapatan), serta rasio keserasian belanja (proporsi belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja). Selain itu, dilakukan analisis pertumbuhan (*growth ratio*) untuk masing-masing komponen pendapatan dan belanja antara tahun 2023 dan 2024. Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memperjelas pola dan tren, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan merujuk pada kerangka teori dan penelitian terdahulu.

Formula yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka analisis rasio keuangan daerah yang umum digunakan dalam literatur akuntansi sektor publik (Halim, 2021; Mahmudi, 2021), yaitu: (1) Rasio Kemandirian =  $(\text{Realisasi PAD} / \text{Realisasi Pendapatan Transfer}) \times 100\%$ ; (2) Rasio Efektivitas PAD =  $(\text{Realisasi PAD} / \text{Target Anggaran PAD}) \times 100\%$ ; (3) Rasio Efisiensi Belanja =  $(\text{Realisasi Total Belanja} / \text{Realisasi}$

Total Pendapatan) x 100%; (4) Rasio Keserasian Belanja Operasi = (Realisasi Belanja Operasi / Realisasi Total Belanja) x 100%; (5) Rasio Keserasian Belanja Modal = (Realisasi Belanja Modal / Realisasi Total Belanja) x 100%; dan (6) Rasio Pertumbuhan = ((Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun n-1) / Realisasi Tahun n-1) x 100%.

Pemilihan kerangka rasio ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelima jenis rasio tersebut secara komprehensif merepresentasikan tiga dimensi utama kinerja keuangan daerah, yaitu dimensi kemandirian fiskal (kemandirian dan efektivitas PAD), dimensi keseimbangan anggaran (efisiensi), dan dimensi alokasi sumber daya (keserasian belanja). Ketiga dimensi ini saling berkaitan: kemandirian fiskal yang rendah berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk belanja modal, sementara efisiensi yang memburuk dapat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja pada salah satu atau kedua komponen belanja. Dengan menganalisis kelima rasio secara terintegrasi, penelitian ini berupaya menghindari kesimpulan yang parsial dan dapat menyesatkan apabila hanya satu rasio saja yang ditelaah, sebagaimana telah disinggung pada bagian gap penelitian.

Periode penelitian mencakup dua tahun anggaran, yaitu 2023 dan 2024, dengan tahun 2024 sebagai tahun fokus analisis (menggunakan data audited) dan tahun 2023 sebagai basis perbandingan untuk menghitung rasio pertumbuhan. Pemilihan periode dua tahun ini didasarkan pada ketersediaan data audited yang dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memberikan gambaran arah tren (directional insight) yang tidak dapat diperoleh dari analisis satu tahun anggaran saja. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah periode pengamatan yang relatif pendek (dua tahun), sehingga generalisasi tren jangka panjang perlu dilakukan dengan hati-hati dan idealnya diperkuat dengan data tahun-tahun anggaran selanjutnya apabila tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.552.128.805.972,14 atau 99,48% dari target anggaran sebesar Rp1.560.183.438.647,37. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.543.327.013.979,97, terjadi kenaikan tipis sebesar 0,57%. Di sisi belanja, realisasi total belanja daerah mencapai Rp1.592.441.517.658,05 atau 92,03% dari anggaran, meningkat 10,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.436.980.765.349,40. Ringkasan perbandingan dua tahun anggaran tersebut disajikan pada Tabel 1.

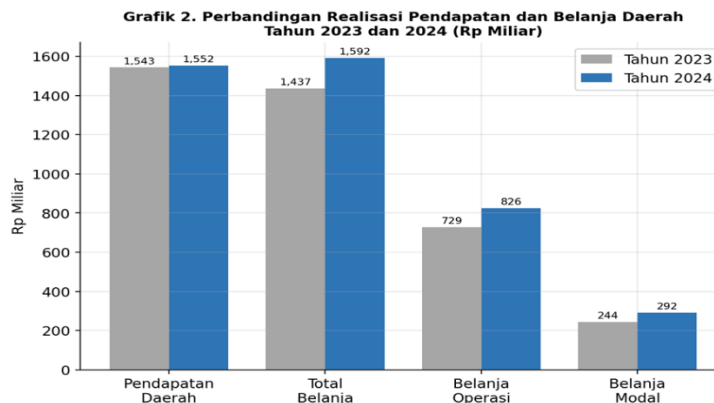
Tabel 1. Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2024

| Komponen                         | Realisasi 2024 (Rp)        | Realisasi 2023 (Rp)       | Perubahan (%) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Pendapatan Daerah                | 1.552.128.805.972,14       | 1.543.327.013.979,97      | +0,57%        |
| Total Belanja                    | 1.592.441.517.658,05       | 1.436.980.765.349,40      | +10,82%       |
| Belanja Operasi                  | 825.523.799.703,80         | 728.592.793.890,40        | +13,30%       |
| Belanja Modal                    | 292.305.992.715,25         | 243.948.650.092,00        | +19,82%       |
| <b>Selisih (Surplus/Defisit)</b> | <b>(40.312.711.685,91)</b> | <b>106.346.248.630,57</b> | -             |

Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, diolah.

Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan signifikan pada struktur fiskal Kabupaten Nias Selatan antara tahun 2023 dan 2024. Pendapatan daerah relatif stagnan (+0,57%), namun total belanja melonjak 10,82%, sehingga pada tahun 2024 terjadi defisit anggaran sebesar Rp40.312.711.685,91 (setara 2,60% dari total pendapatan), berbalik dari kondisi surplus pada tahun 2023 sebesar Rp106.346.248.630,57. Kondisi ini mengindikasikan

adanya ekspansi belanja yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan yang setara, sebuah pola yang konsisten dengan temuan rasio efisiensi belanja yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

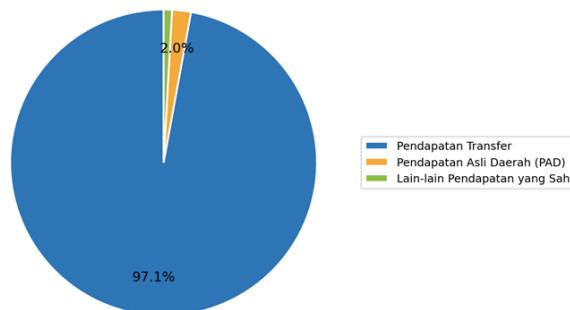


Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, diolah.

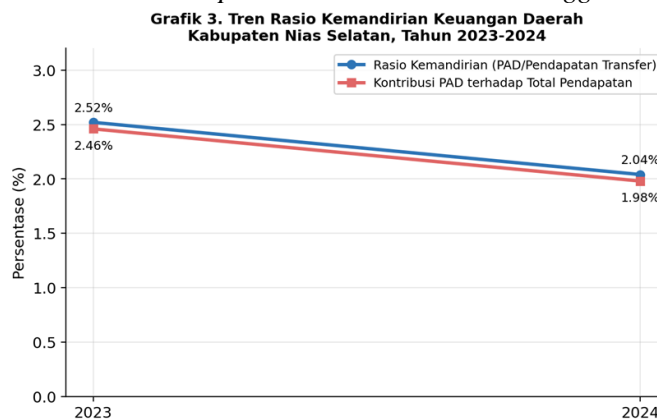
### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Transfer. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, rasio kemandirian Kabupaten Nias Selatan hanya sebesar 2,04% (PAD Rp30,78 miliar dibandingkan Pendapatan Transfer Rp1.507,60 miliar), menurun dari 2,52% pada tahun 2023. Apabila diukur terhadap total pendapatan daerah, kontribusi PAD juga menurun dari 2,46% (2023) menjadi 1,98% (2024). Sebaliknya, ketergantungan terhadap dana transfer tetap dominan pada kisaran 97%, yaitu 97,54% pada tahun 2023 dan 97,13% pada tahun 2024.

**Grafik 1. Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024**



Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, diolah.



Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023-2024, diolah.

Merujuk pada kategorisasi rasio kemandirian Halim dan Kusufi (2021), rasio di bawah 25% dikategorikan sebagai “instruktif”, yaitu pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang masih bersifat sangat tergantung, dengan peranan pemerintah pusat sangat dominan dibanding kemandirian daerah. Rasio kemandirian Kabupaten Nias Selatan yang berada pada kisaran 2% jauh berada di bawah ambang batas tersebut, jauh lebih rendah dibandingkan temuan Pramono (2021) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berkisar 8-15%. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa karakteristik geografis kepulauan, keterbatasan basis pajak (sektor formal yang minim, dominasi sektor informal dan pertanian subsisten), serta keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan menjadi faktor struktural yang membedakan Kabupaten Nias Selatan dari daerah-daerah di Jawa.

Insight penting yang dapat ditarik dari temuan ini adalah bahwa tren rasio kemandirian Kabupaten Nias Selatan justru bergerak ke arah yang negatif (menurun), bukan meningkat sebagaimana diharapkan dalam kerangka penguatan otonomi daerah. Penurunan ini terjadi meskipun realisasi PAD tahun 2024 melampaui target anggarannya (rasio efektivitas 139,53%, akan dibahas pada bagian berikutnya), yang menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada pencapaian target, melainkan pada rendahnya basis dan pertumbuhan PAD itu sendiri secara absolut.

### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah dianggarkan. Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan mencapai Rp30.783.762.868,34 dari target anggaran sebesar Rp22.062.368.430,37, sehingga rasio efektivitas PAD mencapai 139,53%. Apabila dirinci per komponen, Lain-lain PAD yang Sah mencatatkan efektivitas tertinggi (169,99%), diikuti Pajak Daerah (147,82%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (100,00%), sementara Retribusi Daerah justru di bawah target (73,79%).

Tabel 2. Realisasi dan Efektivitas Komponen PAD Tahun Anggaran 2024

| Komponen PAD           | Anggaran 2024 (Rp)       | Realisasi 2024 (Rp)      | Efektivitas    | vs 2023*       |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Pajak Daerah           | 9.486.954.849,37         | 14.023.775.776,15        | 147,82%        | +0,02%         |
| Retribusi Daerah       | 385.605.800,00           | 284.552.800,00           | 73,79%         | +43,93%        |
| Hasil Kekayaan Daerah  | 6.066.435.843,00         | 6.066.435.843,00         | 100,00%        | +26,0%         |
| Lain-lain PAD yang Sah | 6.123.371.938,00         | 10.408.998.449,19        | 169,99%        | -45,1%         |
| <b>TOTAL PAD</b>       | <b>22.062.368.430,37</b> | <b>30.783.762.868,34</b> | <b>139,53%</b> | <b>-18,98%</b> |

\*Perubahan realisasi 2024 dibandingkan realisasi 2023. Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, diolah.

Temuan rasio efektivitas PAD sebesar 139,53% pada satu sisi menunjukkan kapasitas Kabupaten Nias Selatan dalam merealisasikan PAD melampaui target yang ditetapkan, sejalan dengan kategori “sangat efektif” menurut Kepmendagri No. 690.900.327 (rasio di atas 100%). Namun, temuan ini perlu dimaknai secara kritis sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka. Penurunan target anggaran PAD 2024 (Rp22,06 miliar) jika dibandingkan realisasi PAD 2023 (Rp37,99 miliar) menunjukkan adanya under-budgeting—target ditetapkan jauh di bawah realisasi tahun sebelumnya, sehingga pencapaian di atas 100% menjadi lebih mudah diraih secara nominal, meskipun secara aktual PAD justru turun 18,98%.

Insight ini berbeda signifikan dengan temuan Mahmudi (2021), yang dalam studinya pada pemerintah kota menemukan rasio efektivitas PAD pada kisaran 95-110% dengan target anggaran yang relatif stabil dan mendekati realisasi tahun sebelumnya. Pola “efektivitas tinggi namun pertumbuhan negatif” pada kasus Nias Selatan mengindikasikan

adanya kelemahan dalam akurasi perencanaan dan penetapan target PAD, yang dapat menyamakan permasalahan riil berupa stagnasi atau penurunan basis penerimaan asli daerah. Penurunan tajam komponen Lain-lain PAD yang Sah (dari Rp18,96 miliar menjadi Rp10,41 miliar, turun 45,1%) menjadi faktor utama penurunan PAD secara keseluruhan, dan memerlukan investigasi lebih lanjut mengenai sumber-sumber penerimaan pada pos tersebut.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

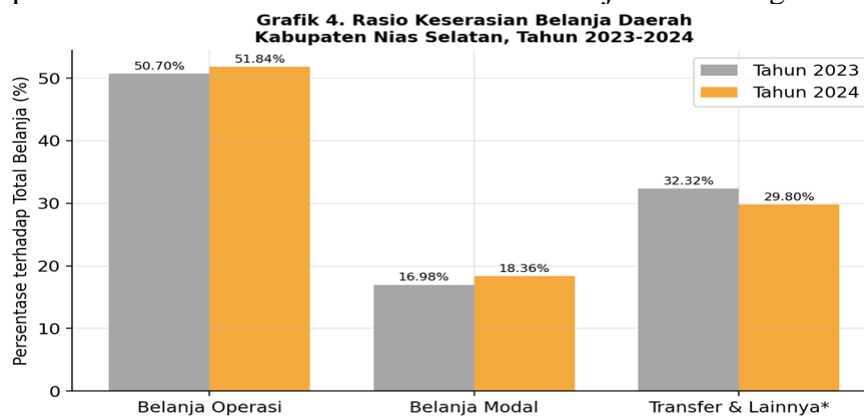
Rasio efisiensi keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan realisasi total belanja terhadap realisasi total pendapatan. Pada Tahun Anggaran 2024, rasio efisiensi mencapai 102,60%, meningkat dari 93,11% pada tahun 2023. Rasio di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran riil sebesar Rp40.312.711.685,91 pada tahun 2024.

Berdasarkan kerangka Bastian (2021), rasio efisiensi di bawah 100% menggambarkan kondisi pengelolaan anggaran yang efisien (surplus), sementara rasio di atas 100% menunjukkan inefisiensi dalam arti belanja tidak tertutupi oleh pendapatan tahun berjalan. Perubahan dari kondisi surplus (2023) menjadi defisit (2024) merupakan temuan penting yang mengindikasikan adanya pergeseran kebijakan fiskal Kabupaten Nias Selatan ke arah ekspansif. Defisit tersebut secara teknis dapat ditutupi melalui pembiayaan daerah (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA tahun sebelumnya), namun keberlanjutan pola ekspansi belanja tanpa diiringi pertumbuhan pendapatan yang sepadan berpotensi menggerus SiLPA dalam jangka menengah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi sumber utama peningkatan rasio efisiensi (penurunan efisiensi), yaitu pertumbuhan belanja operasi (+13,30%) yang melampaui pertumbuhan pendapatan (+0,57%). Hal ini berbeda dengan asumsi umum dalam literatur bahwa defisit anggaran daerah biasanya didorong oleh ekspansi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Pada kasus Nias Selatan, justru belanja operasi—khususnya belanja pegawai dan belanja hibah—menjadi kontributor dominan terhadap pelebaran defisit, sebuah pola yang patut menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

### Rasio Kesorasian Belanja Daerah

Rasio kesorasian belanja menggambarkan proporsi belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, belanja operasi mencapai Rp825.523.799.703,80 atau 51,84% dari total belanja, meningkat tipis dari 50,70% pada tahun 2023. Belanja modal mencapai Rp292.305.992.715,25 atau 18,36% dari total belanja, meningkat dari 16,98% pada tahun 2023. Sisanya, sekitar 29,80% (2024) dan 32,32% (2023), merupakan Transfer ke Desa/Pemda lain dan Belanja Tak Terduga.



\*Transfer & Lainnya mencakup Belanja Tak Terduga dan Transfer ke Desa/Pemda Lain

*Sumber: LKPD Audited Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023-2024, diolah.*

Dominasi belanja operasi pada angka di atas 50% sejalan dengan kondisi umum pemerintah daerah di Indonesia, di mana belanja pegawai biasanya menjadi komponen terbesar. Pada kasus Kabupaten Nias Selatan, belanja pegawai mencapai 55,20% dari total belanja operasi, dengan pertumbuhan sebesar 17,41% dibandingkan tahun 2023 (dari Rp388,14 miliar menjadi Rp455,73 miliar). Pertumbuhan belanja pegawai yang melampaui pertumbuhan belanja operasi secara keseluruhan (13,30%) mengindikasikan bahwa komponen pegawai menjadi pendorong utama ekspansi belanja operasi.

Di sisi lain, peningkatan belanja modal sebesar 19,82% merupakan sinyal positif dari perspektif pembangunan, terutama didorong oleh lonjakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang meningkat hampir 2,5 kali lipat (dari Rp61,78 miliar menjadi Rp153,66 miliar, naik 148,8%). Namun demikian, peningkatan belanja modal ini terjadi bersamaan dengan penurunan PAD, sehingga sumber pembiayaannya kemungkinan besar berasal dari peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang naik dari Rp650,14 miliar menjadi Rp683,54 miliar. Temuan ini berbeda dengan Astuti dan Yuliarti (2021) yang menemukan korelasi positif antara peningkatan PAD dan belanja modal; pada kasus Nias Selatan, peningkatan belanja modal justru tidak berkorelasi dengan penguatan kemandirian fiskal, melainkan masih bertumpu pada dana transfer.

Insight tambahan diperoleh dari munculnya pos Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.954.521.800,00 pada tahun 2024 (tidak ada realisasi pada 2023), yang sebagian besar (Rp1.899.383.200,00) digunakan untuk penanganan status tanggap darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria dan Demam Berdarah Dengue. Meskipun nilainya relatif kecil terhadap total belanja, realisasi yang hanya 14,84% dari anggaran menunjukkan kehati-hatian fiskal dalam penggunaan dana darurat, sekaligus mengindikasikan adanya tantangan kesehatan masyarakat yang turut memengaruhi struktur belanja daerah.

### **Tantangan Pelaksanaan Anggaran dan Implikasinya**

Penyerapan total belanja yang hanya mencapai 92,03% dari anggaran (sisa anggaran tidak terserap sekitar Rp137,84 miliar) mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya pada Belanja Tak Terduga yang hanya terserap 14,84% dan Belanja Subsidi yang hanya terserap 26,48%. Berdasarkan LKPD, hambatan utama meliputi kondisi cuaca yang tidak mendukung dalam pelaksanaan proyek infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami teknis dan regulasi pengadaan barang/jasa, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Pada konteks belanja modal, realisasi sebesar 88,18% dari anggaran—meskipun secara nominal meningkat signifikan dari tahun sebelumnya—menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi proyek infrastruktur. Khususnya pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya terserap 82,56%, faktor cuaca sebagaimana disebutkan dalam LKPD menjadi kendala yang relevan mengingat kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan sebagai daerah kepulauan yang rentan terhadap cuaca ekstrem, terutama pada musim penghujan yang dapat menghambat akses ke lokasi-lokasi proyek yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah pesisir.

Dari sisi pendapatan, rendahnya realisasi Retribusi Daerah (73,79% dari target) memberikan indikasi awal mengenai lemahnya basis kepatuhan wajib retribusi, yang sejalan dengan rendahnya rasio kemandirian secara keseluruhan. Penguatan sistem administrasi penerimaan daerah—misalnya melalui digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak daerah, intensifikasi pendataan objek pajak, serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah—menjadi langkah strategis yang relevan untuk ditindaklanjuti, sejalan dengan rekomendasi yang juga diajukan oleh Sari dan Setiawan (2021) dalam konteks daerah otonomi baru di Indonesia.

## **Sintesis dan Kontribusi Penelitian**

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023-2024 menunjukkan pola fiskal yang khas pada daerah otonom baru berkarakter kepulauan: rasio kemandirian sangat rendah dan menurun, rasio efektivitas PAD tinggi namun menyimpan masalah akurasi penganggaran, rasio efisiensi yang memburuk akibat ekspansi belanja operasi, serta rasio keserasian belanja yang masih didominasi belanja rutin meskipun belanja modal tumbuh signifikan.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa empat rasio tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah. Rasio efektivitas PAD yang tinggi (139,53%) dapat menutupi fakta bahwa kemandirian fiskal justru menurun; demikian pula peningkatan belanja modal yang tampak positif sesungguhnya tidak ditopang oleh penguatan basis pendapatan asli daerah, melainkan oleh dana transfer yang juga meningkat. Pembacaan terintegrasi semacam ini memberikan pemahaman yang lebih utuh dibandingkan analisis rasio tunggal yang banyak ditemukan pada penelitian terdahulu, dan dapat menjadi kerangka rujukan bagi evaluasi kinerja keuangan daerah dengan karakteristik fiskal serupa, khususnya daerah pemekaran di kawasan kepulauan Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan empat hal pokok sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan sangat rendah dan mengalami penurunan dari 2,52% (2023) menjadi 2,04% (2024), dengan ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang konsisten di atas 97%, mengindikasikan kondisi hubungan keuangan pusat-daerah yang masih bersifat instruktif. Kedua, rasio efektivitas PAD mencapai 139,53% pada tahun 2024, namun angka ini lebih mencerminkan rendahnya target anggaran (under-budgeting) dibandingkan kinerja riil, mengingat realisasi PAD justru menurun 18,98% secara absolut.

Ketiga, rasio efisiensi keuangan daerah meningkat dari 93,11% (2023) menjadi 102,60% (2024), menandakan peralihan dari kondisi surplus menjadi defisit anggaran, yang terutama didorong oleh pertumbuhan belanja operasi (13,30%) yang melampaui pertumbuhan pendapatan (0,57%). Keempat, rasio keserasian belanja menunjukkan dominasi belanja operasi (51,84%) dengan belanja pegawai sebagai komponen terbesar (55,20% dari belanja operasi), sementara belanja modal meningkat signifikan (19,82%) namun masih berproporsi rendah (18,36% dari total belanja) dan bersumber dari peningkatan dana transfer, bukan PAD.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan tantangan struktural berupa ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer, pertumbuhan belanja rutin yang melampaui pertumbuhan pendapatan, serta perlunya evaluasi atas akurasi perencanaan target PAD. Rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan meliputi: intensifikasi penggalan sumber-sumber PAD non-konvensional, khususnya pos Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami penurunan tajam; penguatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan; serta pengendalian pertumbuhan belanja pegawai agar tidak melampaui pertumbuhan pendapatan daerah, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal produktif dapat semakin diperluas secara berkelanjutan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yuliarti, N. C. (2021). Analisis rasio keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah di Provinsi Sumatera. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 112-126.
- Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik di Indonesia* (3rd ed.). Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah* (Revised ed.). Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Penerbit Andi.
- Nugroho, B., & Hidayah, N. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 201-215.
- Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Tahun Anggaran 2024*. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Pramono, J. (2021). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah). *Among Makarti*, 14(1), 83-112.
- Pratama, A. R., & Lestari, W. (2024). Rasio keserasian belanja dan kualitas belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 88-101.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sari, D. P., & Setiawan, R. (2021). Analisis kemandirian fiskal daerah otonomi baru di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 45-58.
- Sukmawati, F., & Indrayani, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(2), 134-145.
- Suwanda, D., & Suhardjo, Y. (2021). *Pengelolaan keuangan daerah dan implementasi akrual basis menuju good governance* (Revised ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni, S., & Sari, R. (2022). Analisis rasio keuangan untuk menilai kemandirian keuangan daerah kabupaten kepulauan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(1), 22-35.
- Yulianto, A., & Rahmawati, D. (2023). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pasca pandemi: Analisis rasio kemandirian dan efisiensi belanja. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 55-70.